



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 31**

**TAHUN : 2016**

---

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 29 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **TATA TANAM TAHUNAN PERIODE 2016-2017**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dengan cara meningkatkan produksi pertanian dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya air serta pengembangan agrobisnis, perlu diatur Tata Tanam Tahunan;
  - b. bahwa pembagian dan pemberian air irigasi dilakukan dengan mempertimbangkan luas wilayah Daerah Irigasi dan telah mendapat masukan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Tanam Tahunan Periode 2016-2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
15. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 155 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pola Tanam Padi-Padi-Palawija secara serentak di Daerah Irigasi Sapon, Kalibawang, Pengasih, Papah, Pekik Jamal dan Daerah Irigasi yang mendapatkan Air dari Kalibawang;
16. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 130 Tahun 1989 tentang Petunjuk Teknis Tata Tanam Tahunan di Kabupaten Kulon Progo;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA TANAM TAHUNAN PERIODE 2016-2017.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas dibidang pengelolaan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai kewenangannya.
5. Lembaga Pengelola Irigasi adalah Perangkat Daerah atau lembaga lain yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan operasi dan pemeliharaan.
6. Tata Tanam Tahunan adalah pengaturan waktu tanam, jenis dan varietas tanaman, dan luas tanam untuk mencapai produktivitas yang optimal disertai penggunaan air.
7. Musim Tanam yang selanjutnya disingkat MT adalah waktu yang dibutuhkan untuk budidaya tanaman padi, palawija, dan hortikultura di lahan sawah mulai pengolahan tanah sampai panen.
8. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapatkan air dari satu sumber air melalui satu sistem jaringan irigasi.
9. Jaringan Irigasi adalah satu kesatuan saluran, bangunan dan bangunan pelengkapanya yang berfungsi untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian dan pemberian air.

10. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola.
11. Gabungan P3A yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
12. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
13. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan mengalirkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
14. Kejuron Pengairan adalah wilayah kerja juru pengairan dalam luas tertentu dalam wilayah Daerah Irigasi.
15. Kepengamatan Pengairan adalah wilayah kerja pengamat pengairan dalam luas tertentu di wilayah Daerah Irigasi.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Lembaga Pengelola Irigasi dalam mengatur pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :
  - a. menjaga kesuburan tanah;
  - b. memutus siklus hama; dan
  - c. meningkatkan produksi panen.

## **BAB II**

### **PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi pada jaringan utama secara teratur dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Irigasi berdasarkan kewenangan sebagai berikut :
  - a. Daerah Irigasi Kalibawang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksana tugas pembantuan dari Pemerintah dan dikerjasamakan dengan Dinas;
  - b. Daerah Irigasi Sapon dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. Daerah Irigasi Kecil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - d. pengelolaan dan pemanfatan air irigasi di tingkat petak tersier dan irigasi desa dilaksanakan oleh P3A.
- (2) Pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

#### **Pasal 4**

- (1) Pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi pada saat ada kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan dengan terlebih dahulu diadakan pemberitahuan dan koordinasi dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

- (2) Saluran Induk Kalibawang dimatikan pada tanggal 16 Juli sampai dengan 31 Juli 2016 dalam rangka survei dan pemeliharaan ringan.
- (3) Pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi di masing-masing petak tersier wilayah Kejuron/Gabungan P3A Daerah Irigasi Kalibawang, Daerah Irigasi Sapon dan Daerah Irigasi Kecil untuk pengolahan sawah/tanah dan masa pertumbuhan tanaman MT sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian masing-masing petak tersier dalam 1 (satu) Daerah Irigasi untuk Tata Tanam Tahunan Periode 2016-2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. Rekapitulasi Luas Tanam Periode Tahun 2016-2017;
  - b. Perincian Luas Tanam masing-masing Daerah Irigasi;
  - c. Skema Irigasi Kejuron Pengairan;
  - d. Skema Tata Tanam Tahunan Periode 2016-2017 Daerah Irigasi Kalibawang dan Sapon;
  - e. Peta Tata Tanam Tahunan Periode 2016-2017; dan
  - f. Skema Rencana Pembagian Air Daerah Irigasi Kalibawang Periode 2016-2017.

## **Pasal 5**

- (1) Berdasarkan pertimbangan ketersediaan debit air irigasi dan luas areal, maka perencanaan tata tanam pada Daerah Irigasi Kalibawang diterapkan sistem golongan yaitu :
  - a. Golongan I; dan
  - b. Golongan II.

- (2) Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi wilayah Kejuron/GP3A Kalibawang I, Kalibawang II, sebagian Penjalin yang terdiri dari P3A Serut Mandiri, Sekar Mulyo, Rama, Sumber Mulyo, Tri Manunggal, Tani Mulyo, dan Sidomulyo, sebagian wilayah Kejuron/GP3A Donomulyo yang terdiri dari P3A Banyuharjo, Ngudi Makmur, Tani Rukun, Utama, Sadang, Tri Renggo, Tawang, Gayam dan sebagian Wilayah Kejuron/GP3A Pekik Jamal Kiri yang terdiri dari P3A Kontak Makmur, Sri Mulyo, Bangun Tirto, Rumpun Karya, Pusporejo, Kandegrejo, Bulurejo, Buluseblo, Ngudi Makmur, Karya Makmur, Sewurejo, Pranaji, Tirtomartani, Tirtomargono dan Bubaran masuk Golongan I MT 1 dimulai Bulan Agustus 2016 dan MT 2 panen akhir Bulan April 2017, serta MT 3 dimulai tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017.
- (3) Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Wilayah Kejuron/GP3A Donomulyo Hilir terdiri dari P3A Ngudi Lestari, P3A Ngudi Rahayu, P3A Sido Dadi, P3A Tirto Mulyo, P3A Sido Makmur, P3A Tirto Kencono, P3A Tirtoraharjo, P3A Sido Subur, P3A Jati Tirto, P3A Sidorejo, P3A Tirto Agung, P3A Tirta Boga, P3A Tirto Mulyo, P3A Tirtosari dan P3A Sidorukun MT 2016-2017 masuk Golongan II, MT 1 Padi dimulai Bulan November 2016 dan MT 2 Bulan April sampai dengan Bulan Juli 2017, MT 3 palawija/sayuran panen akhir Bulan Oktober 2017;

- b. Wilayah Kejuron/GP3A Penjalin P3A Bakti Makaryo, P3A Rumekso, P3A Ngudi Makmur, P3A Teraju, P3A Sedyo Makmur, Mantep (B. Jelog) dan P3A Harapan Subur (Selatan rel Kereta Api) MT 2016-2017, MT 1 Padi dimulai Bulan November 2016 dan MT 2 Bulan April sampai dengan Bulan Juli 2017, MT 3 Palawija/sayuran mulai Bulan Agustus sampai dengan Bulan Oktober 2017;
  - c. MT 2016-2017 wilayah Kejuron/Gabungan P3A Papah, MT 1 padi dimulai Bulan November 2016 sampai dengan Bulan Maret 2017 dan MT 2 Bulan April sampai dengan Bulan Juli 2017, MT 3 palawija/sayuran mulai Bulan Agustus 2017 dan panen akhir Bulan Oktober 2017; dan
  - d. MT 2016-2017 wilayah Kejuron/Gabungan P3A Pengasih Timur, Pengasih Barat, Pekik Jamal Kanan dan sebagian Pekik Jamal kiri yang meliputi P3A Suka Makmur, Suka Maju dan Gumuk Pancing MT 1 padi dimulai Bulan November 2016 dan MT 2 Bulan April sampai dengan Bulan Juli 2017, MT 3 palawija/sayuran dimulai Bulan Agustus panen akhir Bulan Oktober 2017.
- (4) MT 2016-2017 wilayah Gabungan P3A Pekik Jamal untuk lahan pantai MT 1 sampai dengan MT 3 palawija/sayuran dimulai Bulan Agustus 2016 sampai dengan akhir Bulan Juli 2017.

## **Pasal 6**

MT 2016-2017 Daerah Irigasi Sapon MT 1 padi dimulai Bulan Agustus 2016 dan MT 2 padi panen akhir Bulan April 2017, MT 3 palawija/sayuran panen akhir Bulan Juli 2017.

### **Pasal 7**

- (1) MT 2016-2017 untuk Daerah Irigasi Kecil dapat memilih pola tanam sebagai berikut :
  - a. MT 1 padi, MT 2 padi, MT 3 palawija/sayuran;
  - b. MT 1 padi, MT 2 palawija/sayuran, dan MT 3 palawija/sayuran; atau
  - c. MT 1 palawija/sayuran, MT 2 padi, dan MT 3 palawija/sayuran.
- (2) Daerah Irigasi kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang air irigasinya cukup dan sulit dikeringkan, maka pola tanamnya dapat menyesuaikan kondisi setempat.

### **Pasal 8**

- (1) MT 2016-2017 pada Daerah Irigasi Kalibawang dan Sapon yang menerapkan pola tanam padi-padi-palawija/sayuran pada saat MT padi boleh menanam palawija/sayuran tetapi pada saat MT palawija/sayuran dilarang menanam padi.
- (2) Pada MT 3 palawija/sayuran apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk tanaman palawija/sayuran, dilakukan koordinasi dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

## **BAB III**

### **KEWAJIBAN PETANI**

#### **Pasal 9**

Pada saat MT palawija/sayuran, petani wajib membuat got drainase yang cukup untuk patusan apabila terjadi hujan atau untuk irigasi pada saat kemarau.

## **BAB IV**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 10**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 9 diberikan sanksi berupa :

- a. surat peringatan 2 (dua) kali; dan
- b. apabila sampai surat peringatan ke 2 (dua) tidak dilaksanakan, maka dilakukan penghentian pelayanan air irigasi.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 11**

Khusus untuk kegiatan budidaya ikan, pengaturan pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi menyesuaikan masing-masing Daerah Irigasi dengan melaksanakan koordinasi dan mempertimbangkan ketersediaan air.

#### **Pasal 12**

Pada saat musim kemarau, apabila terjadi debit air irigasi kurang, maka dalam pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi dilakukan koordinasi dengan mempertimbangkan ketersediaan air.

### **Pasal 13**

Dalam hal terjadi keadaan darurat yang mengakibatkan Peraturan Bupati ini tidak dapat dilaksanakan, maka diadakan koordinasi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 30 Juni 2016  
**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 30 Juni 2016  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**TAHUN 2016 NOMOR 31**